



**PERATURAN DESA
NOMOR 10 TAHUN 2023**

APB DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**DESA BUMIREJO KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

APB Desa TA. 2024

**Pendapatan Desa
Belanja Desa
Pembiayaan**



KEPALA DESA BUMIREJO
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA BUMIREJO
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUMIREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMIREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

- Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
 28. Peraturan Desa Bumirejo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Bumirejo (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 2);
 29. Peraturan Desa Bumirejo Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2026 Desa Bumirejo (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 9);
 30. Peraturan Desa Bumirejo Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 Desa Bumirejo (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMIREJO

Dan

KEPALA DESA BUMIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUMIREJO TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumirejo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

| | |
|--|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 2.229.764.470,00 |
| 2. Belanja Desa | Rp. 2.275.504.487,00 |
| Surplus/Defisit | Rp. (45.740.017,00) |
| 3. Pembiayaan | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 45.740.017,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. 45.740.017,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp. 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Pemerintah Desa dalam Tahun Anggaran berjalan dapat melakukan perubahan APB Desa dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan; dan
- d. Keadaan luar biasa yaitu keadaan tidak seperti yang direncanakan atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
 - 1) peperangan;
 - 2) kerusuhan;
 - 3) revolusi;
 - 4) bencana;
 - 5) pemogokan;

- 6) kebakaran;
- 7) kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang;
- 8) Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.



Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bumirejo

Ditetapkan di : Bumirejo

Pada tanggal : 31 Desember 2023

Kepala Desa,


MUHAMMAD NUR

Diundangkan di : Bumirejo

Pada tanggal : 31 Desember 2023

Sekretaris Desa


MUHAMMAD CHOIRUL FADNI

LEMBARAN DESA BUMIREJO NOMOR 10 TAHUN 2023

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA BUMIREJO
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BUMIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 25.900.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.194.864.470,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 9.000.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.229.764.470,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 605.494.446,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 664.704.841,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 845.905.200,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 159.400.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 2.275.504.487,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (45.740.017,00) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 45.740.017,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 45.740.017,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 45.740.017,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

BUMIREJO, 22 December 2023
 KEPALA DESA

 MUHAMMAD NUR

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BUMIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal


| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 25.900.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.194.864.470,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 9.000.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 2.229.764.470,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>937.807.156,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 797.254.446,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 54.786.000,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 54.786.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 459.528.600,00 | ADD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 459.528.600,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 25.729.446,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 25.729.446,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) | 61.670.000,00 | ADD, DLL, PBH |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 61.670.000,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 43.740.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 43.740.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 8.000.000,00 | PAD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 78.000.000,00 | ADD |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 78.000.000,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 30.590.000,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 29.590.000,00 | |
| 1.1.08 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000,00 | |
| 1.1.90 | | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 14.210.400,00 | PAD, PBH |
| 1.1.90 | 5.1. | Belanja Pegawai | 14.210.400,00 | |
| 1.1.93 | | Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa | 21.000.000,00 | PBH |
| 1.1.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 21.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 32.947.994,00 | |
| 1.2.03 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 32.947.994,00 | ADD, PBH |
| 1.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 32.947.994,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 26.550.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 9.180.000,00 | DDS |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.180.000,00 | |
| 1.3.03 | | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 2.330.000,00 | PBH |
| 1.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.330.000,00 | |
| 1.3.05 | | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 12.260.000,00 | DDS |
| 1.3.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.260.000,00 | |
| 1.3.90 | | Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa/Indeks Desa Membangun (IDM) | 1.330.000,00 | DDS |
| 1.3.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.330.000,00 | |
| 1.3.91 | | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Monografi Desa | 1.450.000,00 | DDS |
| 1.3.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.450.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 52.020.000,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 9.385.000,00 | ADD |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.385.000,00 | |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 2.200.000,00 | ADD |
| 1.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.200.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 4.100.000,00 | PBH |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.100.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll) | 8.400.000,00 | ADD |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.400.000,00 | |
| 1.4.05 | | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 1.510.000,00 | ADD |
| 1.4.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.510.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2.925.000,00 | ADD |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.925.000,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 17.000.000,00 | DDS |
| 1.4.08 | 5.3. | Belanja Modal | 17.000.000,00 | |
| 1.4.10 | | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 6.500.000,00 | ADD |
| 1.4.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.500.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 29.034.716,00 | |
| 1.5.01 | | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 14.550.000,00 | PAD |
| 1.5.01 | 5.3. | Belanja Modal | 14.550.000,00 | |
| 1.5.06 | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 8.109.716,00 | DLL |
| 1.5.06 | 5.1. | Belanja Pegawai | 7.500.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 609.716,00 | |
| 1.5.07 | | Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa | 6.375.000,00 | ADD |
| 1.5.07 | 5.3. | Belanja Modal | 6.375.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>924.198.000,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 82.490.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 71.400.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 71.400.000,00 | |
| 2.1.92 | | Pemberian Makanan Tambahan Anak Usia Sekolah | 11.090.000,00 | DDS |
| 2.1.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.090.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 157.010.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 89.690.000,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 89.690.000,00 | |
| 2.2.03 | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 2.890.000,00 | ADD |
| 2.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.890.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 14.190.000,00 | ADD, DDS |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.190.000,00 | |
| 2.2.94 | | Fasilitasi Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik | 7.350.000,00 | DDS |
| 2.2.94 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.350.000,00 | |
| 2.2.95 | | Fasilitasi Pemanfaatan Pekarangan (Apotik Hidup, Peterikan, Warung Hidup) | 16.015.000,00 | DDS |
| 2.2.95 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 16.015.000,00 | |
| 2.2.97 | | Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu | 22.400.000,00 | DDS |
| 2.2.97 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.900.000,00 | |
| 2.2.97 | 5.3. | Belanja Modal | 7.500.000,00 | |
| 2.2.98 | | Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Tri Bina | 4.475.000,00 | DDS |
| 2.2.98 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.475.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 459.898.000,00 | |
| 2.3.10 | | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 243.317.000,00 | DDS |
| 2.3.10 | 5.3. | Belanja Modal | 243.317.000,00 | |
| 2.3.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 109.387.000,00 | DDS, PBP |
| 2.3.11 | 5.3. | Belanja Modal | 109.387.000,00 | |
| 2.3.12 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 107.194.000,00 | DDS |
| 2.3.12 | 5.3. | Belanja Modal | 107.194.000,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 20.000.000,00 | |
| 2.4.01 | | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 20.000.000,00 | DDS |
| 2.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 4.800.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 4.800.000,00 | DDS |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000,00 | |
| 2.7. | | Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral | 200.000.000,00 | |
| 2.7.92 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Desa | 200.000.000,00 | PBP |
| 2.7.92 | 5.3. | Belanja Modal | 200.000.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>161.760.440,00</u> | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 70.662.000,00 | |
| 3.1.01 | | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 51.222.000,00 | DDS |
| 3.1.01 | 5.3. | Belanja Modal | 51.222.000,00 | |
| 3.1.02 | | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes | 14.500.000,00 | DDS |
| 3.1.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.500.000,00 | |
| 3.1.91 | | Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Desa Tangguh Bencana/OPRB | 4.940.000,00 | DDS |
| 3.1.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.940.000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 24.488.440,00 | |
| 3.2.01 | | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 5.000.000,00 | DDS |
| 3.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 3.2.02 | | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot) | 2.000.000,00 | DDS |
| 3.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll) | 17.488.440,00 | DDS |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 17.488.440,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 25.830.000,00 | |
| 3.3.01 | | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 5.830.000,00 | DDS |
| 3.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.250.000,00 | |
| 3.3.01 | 5.3. | Belanja Modal | 4.580.000,00 | |
| 3.3.05 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 15.000.000,00 | DDS |
| 3.3.05 | 5.3. | Belanja Modal | 15.000.000,00 | |
| 3.3.06 | | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 5.000.000,00 | DDS |
| 3.3.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 40.780.000,00 | |
| 3.4.02 | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 15.780.000,00 | DDS, PBH |
| 3.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.780.000,00 | |
| 3.4.03 | | Pembinaan PKK | 20.000.000,00 | DDS |
| 3.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 3.4.03 | 5.3. | Belanja Modal | 5.000.000,00 | |
| 3.4.90 | | Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) | 5.000.000,00 | ADD |
| 3.4.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>93.338.891,00</u> | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 22.465.000,00 | |
| 4.2.91 | | Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan | 22.465.000,00 | DDS |
| 4.2.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 22.465.000,00 | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 6.093.691,00 | |
| 4.3.02 | | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 2.500.000,00 | ADD |
| 4.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | |
| 4.3.03 | | Peningkatan Kapasitas BPD | 1.465.000,00 | ADD |
| 4.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.465.000,00 | |
| 4.3.90 | | Peningkatan Kapasitas PPKD dan TPK Barang/Jasa | 2.128.691,00 | PBH |
| 4.3.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.128.691,00 | |
| 4.7. | | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 64.780.200,00 | |
| 4.7.02 | | Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa | 64.780.200,00 | DDS |
| 4.7.02 | 5.3. | Belanja Modal | 64.780.200,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u> | <u>158.400.000,00</u> | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 158.400.000,00 | |
| 5.3.90 | | BLT Dana Desa | 158.400.000,00 | DDS |
| 5.3.90 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 158.400.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 2.275.504.487,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (45.740.017,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 45.740.017,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTO | 45.740.017,00 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

BUMIREJO, 22 December 2023
 KEPALA DESA

 MURAMMAD NUR

